

## KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut turut serta memberikan koreksi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan khususnya dilingkungan Bappeda dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Januari 2016

**KEPALA BAPPEDA,**

**HUDAYA**

Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19580612 198503 1 017

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.5. Struktur Organisasi .....	28
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	29
2.1. RPJMD Provinsi Banten .....	29
2.2. Rencana Strategis .....	30
2.3. Target Kinerja Tahun 2016 .....	39
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2015 .....	40
2.5. Anggaran Per Kegiatan .....	44
2.6. Tolok Ukur dan Target Kinerja .....	47
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2015</b> .....	112
3.1. Evaluasi Kinerja .....	113
3.2. Akutanbilitas Keuangan .....	147
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	151

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.LATAR BELAKANG**

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud

merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2015.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2015 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2016.

4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.

#### **1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut:

##### **A. Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
  - b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;

- c. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya;
  - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
  - f. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, perencanaan program dan anggaran pembangunan serta bidang pengendalian program pembangunan;
  - g. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian dengan dinas/badan/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, maupun dengan instansi lainnya;
  - h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah;
  - i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota;
  - j. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan perencanaan daerah;
  - k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - l. penataan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - m. pengawasan dan pengendalian internal Badan;
  - n. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana strategis Badan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi maupun dengan instansi lainnya;
  - c. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya;

- e. mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program nasional;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan daerah;
  - h. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah;
  - i. memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi;
  - j. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
  - m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah;
  - c. Kepala Bidang Perekonomian;
  - d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan;
  - e. Kepala Bidang Pemerintahan;
  - f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan;
  - g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan;
  - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**B. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;
  - h. pengawasan dan pengendalian internal Badan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi Data Pembantu, penyusunan program dan data pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
  - h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
  - i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
  - k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala SubBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

### **C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
  - d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
  - f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
  - g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
  - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
  - i. melaksanakan fungsi kehumasandan administrasi pengelolaan informasi data pembantu;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kas anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Badan;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur keuangan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  - e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
  - f. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan penatausahaan keuangan dari proses penganggaran, pelaksanaan, pembukuan, pengeluaran, evaluasi, verifikasi dan pelaporan keuangan Badan;
  - h. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
  - j. melaksanakan pengawasan administrasi kebhendaharawanan lingkup Badan;
  - k. melaksanakan dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
  - l. melaksanakan penyiapan data, perhitungan kas anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
  - m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. menyusun rencana kerja Badan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan, pengolahan data dan informasi internal badan dan pembangunan daerah;
  - g. menyusun pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
  - k. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
  - m. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
  - o. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**F. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah**

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi

dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah pada mitra bidang;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan tata ruang pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- f. menyiapkan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.

### **G. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan strategis daerah dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### H. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerahbidang penataan infrastruktur wilayah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### I. Kepala Bidang Perekonomian

- (1) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan

- Transmigrasi, ketahanan pangan dan agribisnis, serta mitra bidangnya;
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- f. menyiapkan program bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
  - b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis.

#### **J. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise**

- (1) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise bagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**K. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis**

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**L. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan**

- (1) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan pada mitra bidangnya;

- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan, serta perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, antar sektor dan wilayah;
  - c. pengkoordinasian, pengintegrasian, mensinkronisasikan usulan-usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - d. merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan di kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. menyiapkan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
  - b. Kepala SubBidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.

**M. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender**

- (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
  - d. melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**N. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;

- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **O. Kepala Bidang Pemerintahan**

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban, serta mitra bidangnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah,serta perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. menyiapkan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
  - b. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.

**P. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan kerjasama pembangunan dan

- pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
- d. melaksanakan inisiasi, mediasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian, kerjasama pembangunan mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Q. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban**

- (1) Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan koordinasi perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, perencanaan strategis daerah dan pengendalian mitra Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

## **R. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang penganggaran pembangunan dan program pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;

- e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
  - f. menyiapkan program bidang perencanaan program dan pembangunan;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
  - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan.

#### **S. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penganggaran pembangunan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**T. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan;
  - e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan jangka menengah provinsi;
  - g. melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
  - h. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**U. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - b. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - c. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
  - d. menyiapkan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian dan evaluasi APBN;
  - f. menyiapkan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **V. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**W. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

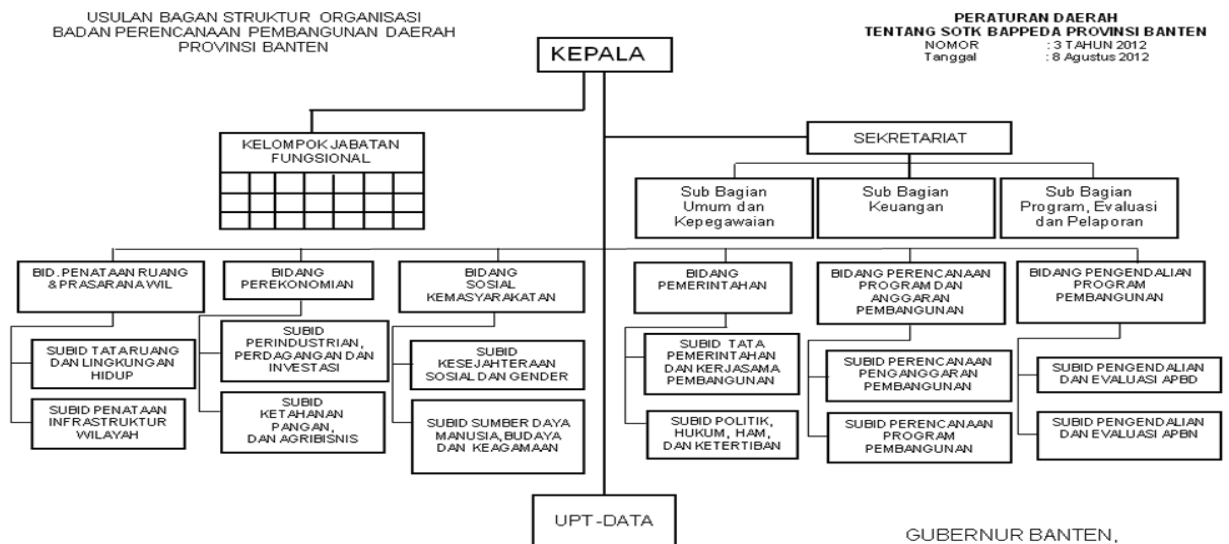
- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian Program APBN dan dana lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;

- c. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**1.5. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2012 dengan memperhatikan agenda dan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), serta komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten.

Periode tahun 2007-2012, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah **“BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.

Keberhasilan pencapaian sasaran agenda pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja pada masing – masing agenda, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam visi – misi pembangunan 5 (lima) tahun yang ditetapkan. Sehingga dalam tahun 2015 ini, target pencapaian Indikator Makro Pembangunan (IMP) adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 74,57 %;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,7 – 6,8 %;
3. Indeks Pembangunan Daerah ditargetkan sebesar 89,2 – 98 %;
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 67,09 %;
5. Prosentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 5,10 %;
6. Prosentase Pengangguran Terbuka yang ditargetkan sebesar 9,24 %.

## 2.2. RENCANA STRATEGIS

Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

**Visi** merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka **Bappeda Provinsi Banten** menetapkan **Visi Tahun 2012-2017** adalah:

**“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN DAERAH”**

**Makna** yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

**1. Profesional.**

- a. Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka regulasi dan ketentuan organisasi;
- b. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten;
- c. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- d. Melahirkan dokumen produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya.
- e. Produk dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

**2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.**

- a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntabel;
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan *Bottom up Planning*.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu:

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.**

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 **“Profesional Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Implementatif”**, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) **Misi Bappeda Provinsi Banten 2012-2017** sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.**
- 2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**

3. **Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
4. **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

**Tujuan** adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

##### **1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
- b. Memperkuat struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):
  - 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
  - 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

**2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**

Tujuannya adalah:

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasarannya adalah:

Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

**3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Tujuannya adalah:

Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasarannya adalah:

Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

**4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.
- b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana yang diukur dari (indikator):
  - 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator):

- 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
- 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.
- 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
- 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.</b>	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.	RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pembangunan.							
<b>Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen data statistik dan data spasial.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.</b>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan	1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. 2) Rasio	100%	100%	100%	100%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ketatalaksanaan.	ketatalaksanaan.	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%
			4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.					

### 2.3. Target Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif, indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### a. Indikator Kinerja Utama

- Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017
- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017
- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2016
- Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2015
- Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD dan APBN Tahun 2015

#### b. Perencanaan Strategis

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
- Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten) Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Jawa dan Sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten
- Penyusunan Dokumen MP3KI
- Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Tahun 2015
- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2015
- Pemetaan Kemiskinan Banten
- Laporan Status Pencapaian MDGs Provinsi Banten
- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016
- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten
- Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN Terpadu Baros
- Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota SERAGON
- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan

#### 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka

selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2015 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2015.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok)
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (100%)
3. Pengendalian Pembangunan Daerah

- a. Capaian Program : Tercapaiannya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%)
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok)
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
  - a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%)
  - c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
  - d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah;
4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan;
6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan;
9. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender;
10. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan;
11. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD;
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya;
13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
14. Pengendalian dan Evaluasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten;
15. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan;
16. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
17. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
21. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah;
22. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
23. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
24. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

## 2.5. Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2015, sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
1	2	3	
<b>I.</b>	<b>Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>	2.939.330.000,00	3.039.330.000,00
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.939.330.000,00	3.039.330.000,00
<b>II.</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	12.947.000.000,00	14.297.000.000,00
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.900.000.000,00	3.150.000.000,00
2.	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.300.000.000,00	1.650.000.000,00
3.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	2.472.000.000,00	2.572.000.000,00
4.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00
5.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00
6.	Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	950.000.000,00	1.050.000.000,00
7.	Perencanaan dan Penganggaran	950.000.000,00	1.050.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
	Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender		
8.	Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00
9.	Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	650.000.000,00	750.000.000,00
<b>III .</b>	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	4.329.930.000,00	4.404.930.000,00
1.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	2.219.930.000,00	2.294.930.000,00
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00
3.	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	960.000.000,00	960.000.000,00
4.	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00	400.000.000,00
<b>IV .</b>	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
1.	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
<b>V .</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	1.807.800.000,00	1.842.800.000,00
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan	757.800.000,00	757.800.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
	Neraca Aset		
2.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.050.000.000,00	1.085.000.000,00
<b>VI .</b>	<b>Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>	10.967.453.000,00	11.411.900.000,00
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.275.800.000,00	2.725.800.000,00
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.687.728.000,00	2.582.175.000,00
3.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.014.000.000,00	4.109.000.000,00
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	795.000.000,00	800.000.000,00
5.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	824.925.000,00	824.925.000,00
6.	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	370.000.000,00	370.000.000,00
<b>VII.</b>	<b>Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	950.000.000,00	950.000.000,00
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	950.000.000,00	950.000.000,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>34.991.513.000,00</b>	<b>36.995.960.000,00</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8.502.000.000,00</b>	<b>7.583.000.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43.493.513.000,00</b>	<b>44.578.960.000,00</b>

## 2.6. Tolok Ukur Dan Target Kinerja

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2015 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>				
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi APBD Perubahan SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	Verifikasi APBD Perubahan SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	1 dok
		Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Provinsi Banten	Provinsi Banten		
		Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030	Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030	2 dok	2 dok
		Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	1 dok	1 dok
		Studi Penyusunan Prioritas Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Banten	Studi Penyusunan Prioritas Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok
		Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Banten	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten	Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Ruang)	Ruang)		
		Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	8 dok	8 dok
		Rapat Koordinasi Evaluasi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	Rapat Koordinasi Evaluasi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	3 dok	3 dok
		Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 dengan Pemerintah Pusat	Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 dengan Pemerintah Pusat	4 dok	4 dok
			Penyusunan Rapergub Standar Operasional Prosedur (SOP) BKPRD Provinsi Banten		1 Rapergub
			Bimbingan Teknis Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Banten		1 dok
			Rapat Koordinasi Penyusunan Review RPJMD Tahun 2010-2017 Mitra Subid Tata Ruang dan LH		1 dok
	<b>Perencanaan pembangunan;</b>				
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	4 dok	4 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Tahun 2016	Tahun 2016		
		Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	1 dok	1 dok
		Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	3 dok	3 dok
		Kajian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Banten	Kajian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Banten	3 dok	0 dok
		Kajian Riview Target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	Kajian Riview Target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 dok	1 dok
			Rakor Isu Isu Strategis Provinsi Banten Tahun 2017		1 dok
			Rapergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2016		1 dok
	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD TA.2016	Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD TA.2016	1 dok	1 dok
		Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan	Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Pendanaan Pembangunan Daerah ( UKPPD ) Tahun 2016	Pendanaan Pembangunan Daerah ( UKPPD ) Tahun 2016		
		Fasilitasi Musrenbangnas	Fasilitasi Musrenbangnas	1 dok	1 dok
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2016	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Ta. 2016	2 dok	2 dok
		Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2015	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Apbd (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2015	2 dok	2 dok
		Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016	Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016	2 dok	2 dok
		Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2016	Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2016	1 dok	1 dok
			Sosialisasi Pergub Bankeu Ke Kabupaten/Kota TA. 2016		1 dok
			Penyusunan Aplikasi Daftar Rincian Program Dan Kegiatan		1 dok
			Persiapan RAPBD TA. 2016		2 dok
			Persiapan Pelaksanaan Pergub TA. 2016		2 dok
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan	Evaluasi Renja Mitra Subid 2014	Evaluasi Renja Mitra Subid 2014	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Pangan dan Agribisnis				
		Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016	Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016	Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2015	Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - daerah	1 dok	1 dok
		Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi kreatif Provinsi Banten	Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi kreatif Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester	2 dok	2 dok
		Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama	1 dok	1 dok
		Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	1 dok	1 dok
		Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan (PAD) Provinsi Banten	Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan (PAD) Provinsi Banten	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD 2012-2017 Mitra Bidang Perekonomian Tahun 2016		1 dok
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	dan Bisnis Kelautan	Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014	Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014		
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok
		Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis	Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		FGD Bidang Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok
		FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok
		FGD Bidang Permodalan di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Permodalan di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok
		Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok
		FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok
		Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok
		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten	1 dok	1 dok
			Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah	Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah	5 dok	5 dok
		Monitoring (Monev) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Monitoring (Monev) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok
		Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	1 dok	1 dok
		Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2016	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Program Sektor Air Minum Dan Sanitasi	Koordinasi Perencanaan Program Sektor Air Minum Dan Sanitasi	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 dok	1 dok
		Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air	Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air	1 dok	1 dok
		Analisis Kinerja Bidang Perumahan Permukiman	Analisis Kinerja Bidang Perumahan Permukiman	1 dok	1 dok
		Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-An	Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-An	1 dok	1 dok
		Penyusunan Data Base Sanitasi	Penyusunan Data Base Sanitasi	1 dok	1 dok
		Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD Mitra Bidang Penataan Ruang		1 dok
	Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2014	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2014	6 dok	6 dok
		Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2016	6 dok	6 dok
		Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok
		Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra	6 dok	6 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban		
		Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok
		Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok
		Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2016	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Bidang Tahun 2016 Mitra Sub Bidang	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Bidang Tahun 2016 Mitra Sub Bidang	1 dok	1 dok
		Koordinasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Hak Azazi Manusia (RANHAM)	Koordinasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Hak Azazi Manusia (RANHAM)	1 dok	1 dok
		Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 dok	1 dok
		Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	4 dok	4 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2015 - 2017 Mitra Subid Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Drpk SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Drpk SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan PUG	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan PUG	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba		
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012-2017 Mitra Subid Kesejahteraan Sosial Dan Gender		1 dok
	Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan	Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan	Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015	Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Keagamaan Tahun 2015	Keagamaan Tahun 2015		
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	1 dok	1 dok
		Penyusunan rancangan indikator output dan outcome kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	Identifikasi Isu Strategis Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten	Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Seminar Budaya Kerja Banten	Seminar Budaya Banten	1 dok	1 dok
		Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012 - 2017 Mitra Subid SDM, Budaya dan Keagamaan		1 dok
	Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	1 dok	1 dok
		Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	3 dok	3 dok
		Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata	Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Pemerintahan	Pemerintahan		
		Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016	Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016	7 dok	7 dok
		Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015	Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015	7 dok	7 dok
		Koordinasi Integrasi, Sinergitas, Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah	Koordinasi Integrasi, Sinergitas, Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah	1 dok	1 dok
		Koordinasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD	Koordinasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2015	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok
		Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015	1 dok	1 dok
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012-2017 Mitra Subid Tata Pemerintahan		1 dok
			Penyusunan Laporan Ketahanan Daerah		1 dok
			Penyusunan Lampiran RAD (Rencana Aksi Daerah)		1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
			Pengentasan Daerah Tertinggal Tahun 2016		
	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>				
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014	Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014	1 dok	1 dok
		Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014	8 dok	8 dok
		Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Pprovinsi Banten TA. 2015	Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Pprovinsi Banten TA. 2015	4 dok	4 dok
		Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	2 dok	2 dok
		Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015	2 dok	2 dok
		Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan	1 paket	1 paket

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Provinsi Banten	Provinsi Banten		
			Penyusunan PERKIN dan IKU Perubahan Provinsi Banten Tahun 2015		1 dok
			Sistem Pemetaan Monitoring dan Evaluasi		1 Software Pemetaan dan Evaluasi
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2015	8 Dok (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon dan TP, 4 Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota	8 Dok (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon dan TP, 4 Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota
		Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2015	4 Dok (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan DAK	4 Dok (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan DAK
		Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2015	2 dok (22 buku)	2 dok (22 buku)
		Fasilitasi Rakor Pusat Dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016	Fasilitasi Rakor Pusat Dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016	1 dok (20 buku)	1 dok (20 buku)
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	12 dok	12 dok
		Penyusunan Peraturan Gubernur tentang strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2015	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016	Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro-Poor Planning budgeting and Monitoring (P3BM)	Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro-Poor Planning budgeting and Monitoring (P3BM)	1 dok	1 dok
		Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	5 dok	5 dok
	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja	1 dok	1 dok
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon	1 dok	1 dok
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang	1 dok	1 dok
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak	1 dok	1 dok
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Tangerang	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Tangerang	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>				
	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015	Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015	1 dok	1 dok
		Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015	Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015	Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat	Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat	3 dok	3 dok
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG	Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG	3 dok	3 dok
		Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok
		Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	1 dok	1 dok
		Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	1 dok	1 dok
		Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON	Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON	1 dok	1 dok
			RAKORTAS Banten - Lampung Tahun		1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
			2015		
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;				
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2014	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2014	1 dok	1 dok
		Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok
		Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015TA. 2014	Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015TA. 2014	1 dok	1 dok
		Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok
		Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA	Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Provinsi Banten	Provinsi Banten		
		Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok
		Dokumen LRA , Laporan Oprasional (LO) Laporan perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi berbasis Akrual Kegiatan SKPD	Dokumen LRA , Laporan Oprasional (LO) Laporan perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi berbasis Akrual Kegiatan SKPD	1 dok	1 dok
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok
		Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015 Semester I dan Semester II	Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015 Semester I dan Semester II	1 dok	1 dok
		Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015	Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015	1 dok	1 dok
		Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015	Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015	1 dok	1 dok
		Dokumen Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Prov. Banten TA. 2015	Dokumen Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Prov. Banten TA. 2015	1 dok	1 dok
		Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2015	oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2015		
		Dokumen Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015	Dokumen Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015	1 dok	1 dok
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok
		Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015	Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Penyusunan DRPK Tahun 2016	Penyusunan DRPK Tahun 2016	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016	Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016	1 dok	1 dok
		Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPAP Tahun 2015	Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPAP Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	12 dok	12 dok
		Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provisi Banten	Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provisi Banten	12 dok	12 dok
		Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	12 dok	12 dok
		Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian	Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian	1 dok	1 dok
		Anugerah Pangripta Banten	Anugerah Pangripta Banten	1 dok	1 dok
		Koordinasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 dok	1 dok
		Pembuatan Maket dan Site Plant Gedung Bappeda Provinsi Banten	Pembuatan Maket dan Site Plant Gedung Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provisi Banten	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provisi Banten	1 dok	1 dok
		Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA)	Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA)	1 dok	1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten	Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok
	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>				
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat ( 1 unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat ( 1 unit)	1 unit	1 unit
		Pengadaan Mesin Tik Elektrikal (10 unit)	Pengadaan Mesin Tik Elektrikal (10 unit)	10 Unit	10 Unit
		Pengadaan Filling Kabinet (5 unit)	Pengadaan Filling Kabinet (5 unit)	5 Unit	5 Unit
		Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (10 unit)	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (10 unit)	10 Unit	10 Unit
		Pengadaan Sofa Perpustakaan	Pengadaan Sofa Perpustakaan	1 Unit	1 Unit
		Pengadaan Penggantian Gordyn	Pengadaan Penggantian Gordyn	1 Paket	1 Paket
		Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan	Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan	1 Paket	1 Paket
		Pengadaan AC Split 1 PK (10 unit)	Pengadaan AC Split 1 PK (10 unit)	10 unit	10 unit
		Pengadaan Piring Ceper dan Gelas	Pengadaan Piring Ceper dan Gelas	1 Paket	1 Paket
		Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung	1 Paket	1 Paket
		Pengadaan Loudspeaker Ruangan	Pengadaan Loudspeaker Ruangan	1 Paket	1 Paket
		Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan	1 Paket	1 Paket

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program	1 Paket	1 Paket
		Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (8 unit)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (8 unit)	8 unit	8 unit
		Belanja Modal Pengadaan Note Book (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Note Book (10 unit)	10 unit	10 unit
		Belanja Modal Pengadaan Printer (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Printer (10 unit)	10 unit	10 unit
		Belanja Modal Pengadaan Lemari Perpustakaan dan PPAP	Belanja Modal Pengadaan Lemari Perpustakaan dan PPAP	1 Paket	1 Paket
		Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip (10 unit)	10 Unit	10 Unit
		Belanja Modal Pengadaan Roll O'pack (2 unit)	Belanja Modal Pengadaan Roll O'pack (2 unit)	2 Unit	2 Unit
		Belanja Modal Pengadaan Penggantian Audio Amplifier Ruang Rapat Paripurna	Belanja Modal Pengadaan Penggantian Audio Amplifier Ruang Rapat Paripurna	1 paket	1 paket
		Belanja Modal Pengadaan Slide Projector (6 unit)	Belanja Modal Pengadaan Slide Projector (6 unit)	6 Unit	6 Unit
		Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda	Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda	1 paket	1 paket
		Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua	Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua	1 paket	1 paket
		Pemasangan Relling Kantin	Pemasangan Relling Kantin	1 paket	1 paket
		Pengadaan Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda	Pengadaan Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda	1 paket	1 paket
		Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan	Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan	1 paket	1 paket

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Angkutan Sampah	Angkutan Sampah		
			Belanja Modal Pengadaan PC Komputer		1 Unit
			Belanja UPS		1 Unit
			Pengadaan Printer Ploter		1 Unit
			Pengadaan Brangkas		1 Unit
			Pengadaan Ruang Bidang Bappeda		1 paket
			Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Software Pemetaan		1 paket
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 30 unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset	12 Bulan, 30 unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset
		Pemeliharaan Inventaris Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penunjang Penguatan Kelembagaan	Penunjang Penguatan Kelembagaan	2 dok	2 dok
		Penyediaan Barang Habis Pakai	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	12 bulan
		Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 bulan	12 bulan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Bahan Cetak	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	12 bulan
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	12 bulan
		Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	12 bulan	12 bulan
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	83 Orang	83 Orang
		Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	40 Orang	40 Orang
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok
		Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	1 dok	1 dok
		Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	6 Orang	2 Orang
			fasilitasi pendataan ulang PNS Bappeda Provinsi Banten		1 dok

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda	Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda	1 Keg 25 Orang	1 Keg 25 Orang
		Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 Keg 15 Orang	1 Keg 15 Orang
		Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Khusus Bappeda	Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 dok	1 dok
	<b>Statistik;</b>				
	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok
		Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	1 dok	1 dok
		Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	1 dok	1 dok
		Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	1 dok	1 dok
		Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok
		Penyusunan Profile Informasi Pembangunan	Penyusunan Profile Informasi Pembangunan	1 video Pembangunan dan Publikasi	1 video Pembangunan dan Publikasi Data

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
		Daerah	Daerah	Data Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet dan banner)	Pembangunan Daerah (Booklet, Leaflet dan banner)

## 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, dijelaskan pada tabel berikut ini :

**PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : BAPPEDA PROVINSI BANTEN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	3 Dok	1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<b><u>3.039.330.000</u></b>
			1 Dokumen	1 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014	<b>3.039.330.000</b>
			1 Dokumen	2 VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016	

			1 Dokumen	3	VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016	
			1 Dokumen	4	4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016	
			1 Dokumen	5	VERIFIKASI APBD PERUBAHAN SKPD MITRA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015	
			1 Dokumen	6	KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH	
			1 Dokumen	7	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
			1 Dokumen	8	PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN	
			1 Dokumen	9	RAPAT KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015	
			2 Dokumen	10	EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030	
			1 Dokumen	11	KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II dan III	

			2 Dokumen	12	STUDI PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU PROVINSI BANTEN
			1 Dokumen	13	KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
			2 Dokumen	14	KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI BANTEN
			1 Dokumen	15	KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAH (DAS) TERPADU PROVINSI BANTEN
			2 Dokumen	16	IDENTIFIKASI POTENSI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIDANAU PROVINSI BANTEN
			1 Dokumen	17	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMENFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN (MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG)
			8 Dokumen	18	RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
			3 Dokumen	19	RAPAT KOORDINASI EVALUASI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II DAN III

			4 Dokumen	20	KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 DENGAN PEMERINTAH PUSAT	
			1 Rapergub	21	PENYUSUNAN RAPERGUB STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BKPRD PROVINSI BANTEN	
			1 Dokumen	22	BIMBINGAN TEKNIS KOORDINASI PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI BANTEN	
			1 Dokumen	23	RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN REVIEW RPJMD TAHUN 2010-2017 MITRA SUBID TATA RUANG DAN LH	
2.	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	100%	2.	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b><u>14.297.000.000</u></b>  <b>3.150.000.000</b>

		1 DOKUMEN	1	PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
		1 DOKUMEN	2	FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
		1 DOKUMEN	3	PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
		1 DOKUMEN	4	MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
		1 DOKUMEN	5	PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
		2 DOKUMEN	6	KONSULTASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN/KOTA
		1 DOKUMEN	7	SOSIALISASI PERGUB JUKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
		0 Dokumen	8	KAJIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
		1 DOKUMEN	9	KAJIAN REVIEW TARGET RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012- 2017
		1 DOKUMEN	10	RAKOR ISU - ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

			1 DOKUMEN	11 RAPERGUB JUKNIS FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016	
		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>1.650.000.000</b>
			1 Dokumen	1 Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2016	
			1 Dokumen	2 Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016	
			1 Dokumen	3 Fasilitasi Musrenbangnas	
			2 Dokumen	4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016	
			2 Dokumen	5 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015	
			2 Dokumen	6 Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016	

			1 Dokumen	7	Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016	
			1 Dokumen	8	Sosialisasi Pergub Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016	
			1 Dokumen	9	Penyusunan Aplikasi Daftar Rincian Program dan Kegiatan	
			2 Dokumen	10	Persiapan RAPBD Tahun 2016	
			2 Dokumen	11	Persiapan Pelaksanaan Pergub Tahun 2016	
		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>4.</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>1.225.000.000</b>
			1 Dokumen	1	Evaluasi Renja Mitra 2014	
			1 Dokumen	2	Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016	
			1 Dokumen	3	Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016	
			1 Dokumen	4	Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016	
			1 Dokumen	5	Verifikasi Renja Perubahan 2015	
			1 Dokumen	6	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	

			1 Dokumen	7	Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten	
			2 Dokumen	8	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester	
			1 Dokumen	9	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama	
		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	1 Dokumen	10	Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	<b>2.572.000.000</b>
			1 Dokumen	11	Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten	
			1 Dokumen	12	Penyusunan Review RPJMD 2012-2017 Mitra Bidang Perekonomian Tahun 2015	
			<b>100%</b>	<b>5.</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis</b>	
			1 Dokumen	1	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014	

			1 Dokumen	2	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016
			1 Dokumen	3	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016
			1 Dokumen	4	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016
			1 Dokumen	5	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015
			1 Dokumen	6	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah
			1 Dokumen	7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016
			1 Dokumen	8	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015
			1 Dokumen	9	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan
			1 Dokumen	10	Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis
			1 Dokumen	11	FGD Bidang Infrastruktur Di Kawasan Minapolitan

			1 Dokumen	12 FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir Di Kawasan Minapolitan	
			1 Dokumen	13 FGD Bidang Permodalan Di Kawasan Minapolitan	
			1 Dokumen	14 Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			1 Dokumen	15 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			1 Dokumen	16 FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			1 Dokumen	17 Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			1 Dokumen	18 Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	
			1 Dokumen	19 Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	
			1 Dokumen	20 Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten	

		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>6. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>1.550.000.000</b>
			5 Dokumen	1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA MITRA INFRASTRUKTUR WILAYAH	
			1 Dokumen	2 MONITORING (MONEV) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	
			1 Dokumen	3 VERIFIKASI RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016	
			1 Dokumen	4 VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016	
			1 Dokumen	5 RAPAT KOORDINASI BIDANG (RAKORBID) MITRA PENATAAN RUANG DAN PRASARANA WILAYAH SINERGITAS PERENCANAAN	
			1 Dokumen	6 DAERAH DAN NASIONAL TAHUN 2016	
			1 Dokumen	7 KOORDINASI PERENCANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH	

			1 Dokumen	8	VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015
			1 Dokumen	9	KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI
			1 Dokumen	10	KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
			1 Dokumen	11	KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR
			1 Dokumen	12	KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI
			1 Dokumen	13	ANALISIS KINERJA BIDANG SUMBER DAYA AIR
			1 Dokumen	14	ANALISIS KINERJA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
			1 Dokumen	15	LOKAKARYA PERENCANAAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG KE - PU - AN
			1 Dokumen	16	PENYUSUNAN DATABASE SANITASI
			1 Dokumen	17	PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015
			1 Dokumen	18	PENYUSUNAN REVIEW RPJMD MITRA BIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>7. Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban</b>	<b>1.150.000.000</b>
			6 Dokumen	1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum, Ham dan Ketertiban Tahun 2014	
			6 Dokumen	2 Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang	
			6 Dokumen	3 Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang	
			6 Dokumen	4 Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang	
			6 Dokumen	5 Verifikasi Renja Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang	
			6 Dokumen	6 Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang	
			6 Dokumen	7 Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang	

			1 Dokumen	8	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Mitra Bidang Pemerintahan Tahun 2016	
			1 Dokumen	9	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2016 Mitra Sub Bidang	
			1 Dokumen	10	Koordinasi Program Dan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia (RANHAM)	
			1 Dokumen	11	Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Dan Kabupaten/Kota	
			4 Dokumen	12	Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	13	Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM Dan Ketertiban	
			1 Dokumen	14	Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012 - 2017 Mitra Subid Politik, hukum, HAM dan Ketertiban	
		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>8.</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender</b>	<b>1.050.000.000</b>

			1 Dokumen	1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2014	
			1 Dokumen	2 VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016	
			1 Dokumen	3 VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016	
			1 Dokumen	4 VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016	
			1 Dokumen	5 VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2015	
			1 Dokumen	6 KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016	
			1 Dokumen	7 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUHA	
			1 Dokumen	8 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUG	
			1 Dokumen	9 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN NARKOBA	

			1 Dokumen	10	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA SEHAT	
			1 Dokumen	11	KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY)	
			1 Dokumen	12	PENYUSUNAN REVIEW RPJMD TAHUN 2012-2017 MITRA SUBID KESOS GENDER	
		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>9.</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan</b>	<b>1.200.000.000</b>
			1 dokumen	1	Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan	
			1 dokumen	2	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	
			1 dokumen	3	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	
			1 dokumen	4	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	

			1 dokumen	5	Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015	
			1 dokumen	6	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	
			1 dokumen	7	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015	
			1 dokumen	8	Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	
			1 dokumen	9	Identifikasi Issu Strategis Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	
			1 dokumen	10	Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten	
			1 dokumen	11	Seminar Budaya Banten	
			1 dokumen	12	Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	
			1 dokumen	13	Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012-2017 Mitra Sub Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan	

		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>10. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan</b>	<b>750.000.000</b>
			1 DOK	1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	
			3 DOK	2 Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	
			1 DOK	3 Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	
			7 DOK	4 Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016	
			7 DOK	5 Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015	
			1 DOK	6 Fasilitasi Rakor Pusat dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016	
			1 DOK	7 Koordinasi Capian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD	
			1 DOK	8 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten / Kota Tahun 2015	

			1 DOK	9	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota	
			1 DOK	10	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015	
3.	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	1 DOK	11	Penyusunan Review RPJMD tahun 2012-2017 Mitra Subid Tata Pemerintahan	<b>4.404.930.000</b>
			1 DOK	12	Penyusunan Laporan Ketahanan Daerah	
			1 DOK	13	Penyusunan Lampiran RAD (Rencana Aksi Daerah) Pengentasan Daerah Tertinggal Tahun 2016	
			100%	11.	<b>Pengendalian dan Evaluasi Program APBD</b>	<b>2.294.930.000</b>
			1 Dokumen	1	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 Dokumen	2	Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014	

			8 Dokumen	3	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014	
			1 Dokumen	4	Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015	
			4 Dokumen	5	Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			2 Dokumen	6	Pemantauan Hasil Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	7	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	
			2 Dokumen	8	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015	
			1 Paket 1 dokumen	9	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Provinsi Banten	
				<b>12.</b>	<b>Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya</b>	<b>750.000.000</b>

		<p>8 Dokumen (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon da TP Provinsi, 4 Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota, 2 Rapat koordinasi</p> <p>4 Dokumen (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan Pelaksanaan DAK dan 2 Rapat Koordinasi</p> <p>2 Dokumen (22 Buku)</p> <p>1 Dokumen (20 Buku)</p>	<p>1 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2015</p> <p>2 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2015</p> <p>3 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2015</p> <p>4 Fasilitasi Rakor Pusat dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016</p>	
		100%	13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	960.000.000

			12 Dokumen	1	Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan	
			1 Laporan	2	Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	
			1 Dokumen	3	Penyusunan Pergub tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Banten Tahun 2012-2017	
			1 Dokumen	4	Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	5	Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016	
			1 Dokumen	6	Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro Poor Planing Budgeting and Monitoring (P3BM)	
			1 Dokumen	7	Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	
			5 Dokumen	8	Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten	
			100%	14.	<b>Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten</b>	<b>400.000.000</b>

4	Kerjasama Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	1 Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan MP3Ei	
			1 Dokumen	2 Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon	
			1 Dokumen	3 Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang	
			1 Dokumen	4 Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak	
			1 Dokumen	5 Pengendalian Dan pengembangan KPI Tangerang	
			100%	<b>15. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan</b>	<b><u>1.050.000.000</u></b>
		Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah			<b>1.050.000.000</b>
			1 Dokumen	1 Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015	
			1 Dokumen	2 Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015	
			1 Dokumen	3 Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015	

			3 Dokumen	4 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat	
			3 Dokumen	5 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG	
			2 Dokumen	6 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	
			1 Dokumen	7 Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	
			1 Dokumen	8 Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	
5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	9 Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON	
			1 Dokumen	10 RAKORTAS Banten-Lampung tahun 2015	
					<u>1.842.800.000</u>

		Tercapai Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	16. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	757.800.000
	1 Dokumen			1 Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	
	1 Dokumen			2 Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
	1 Dokumen			3 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Satuan Standar Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
	1 Dokumen			4 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	

			1 Dokumen	5	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset & Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	6	Penyusunan Dokumen SPP SPM SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	7	Penyusunan Dokumen LRA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi Berbasis Akrua! Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	8	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	9	Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II	
			1 Dokumen	10	Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	

			1 Dokumen	11	Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	12	Penyusunan dan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	
			1 Dokumen	13	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA 2015	
			1 Dokumen	14	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015	
		<b>Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>100%</b>	<b>17.</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>1.085.000.000</b>
			1 Dokumen	1	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2014	
			1 Dokumen	2	Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2014	
			1 Dokumen	3	Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2014	

			1 Dokumen	4	Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2015	
			1 Dokumen	5	Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015	
			1 Dokumen	6	Penyusunan Tapkin dan Iku Bappeda Provinsi Banten 2015	
			2 Dokumen	7	Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Banten 2016	
			1 Dokumen	8	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016	
			1 Dokumen	9	Penyusunan DRPK Tahun 2016	
			1 Dokumen	10	Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016	
			1 Dokumen	11	Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015	
			12 Dokumen	12	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	
			12 Dokumen	13	Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	14	Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Se Provinsi Banten	
			1 Dokumen	15	Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	

6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	1 Dokumen	16	Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian	
		1 Dokumen	17	Anugerah Pangripta Banten	
		1 Dokumen	18	Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		1 Dokumen	19	Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten	
		1 Dokumen	20	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	
		1 Dokumen	21	Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA)	
		1 Dokumen	22	Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten	
					<b><u>11.411.900.000</u></b>

		<b>Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.725.800.000</b>
			1 Unit	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	
			10 Unit	2 Pengadaan Mesin Tik Elektrikal	
			10 Unit	3 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	
			1 Paket	4 Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung	
			10 Unit	5 Pengadaan Lemari Arsip	
			1 Unit	6 Pengadaan Sofa Perpustakaan	
			1 Paket	7 Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan	
			5 Unit	8 Pengadaan Filling Kabinet	
			3 Unit	9 Pengadaan Roll Opack	
			1 Paket	10 Pengadaan Rak Perpustakaan dan Ruang PPAP (Display)	
			1 Paket	11 Pengadaan Pembangunan Auning Koridor/Selasar Kantor Bappeda	

			1 Paket	12	Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah
			1 Paket	13	Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua
			1 Paket	14	Pemasangan Reling Kantin
			1 Paket	15	Pengadaan/Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda
			10 Unit	16	Pengadaan Komputer/PC
			10 Unit	17	Pengadaan Notebook
			10 Unit	18	Pengadaan Printer
			10 Unit	19	Pengadaan AC Split 1 PK
			1 Paket	20	Pengadaan/Penggantian Vertikal Blind
			1 Paket	21	Pengadaan Piring Ceper dan Gelas
			6 Unit	22	Pengadaan Infocus
			1 Paket	23	Pengadaan/Penggantian Audio System Ruang Rapat Parpurna
			1 Paket	24	Pengadaan Speker Ruangan
			1 Paket	25	Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan
			1 Paket	26	Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program

			1 unit	27	Pengadaan Brankas (1 unit)	
			1 Unit	28	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (1 Unit)	
			1 Unit	29	Pengadaan UPS (1 unit)	
			1 Unit	30	Pengadaan Printer Plotter (1 unit)	
			1 Paket	31	Penataan Ruang Bidang Bappeda	
			1 Paket	32	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Software Pemetaan	
		<b>Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan</b>	<b>100%</b>	<b>19.</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.582.175.000</b>
			12 Bulan	1	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	
			12 Bulan, 30 Unit	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
			Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit			
			Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit			
			Genset			

			12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	3 Pemeliharaan Inventaris Kantor	
	<b>Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan</b>	<b>100%</b>		<b>20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>	<b>4.109.000.000</b>
			2 Dokumen	1 Penunjang Penguatan Kelembagaan	
			12 Bulan	2 Penyediaan Bahan Habis Pakai	
			12 Bulan	3 Penyediaan Bahan Cetak	
			12 Bulan	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	
			12 Bulan	5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internert dan PHBI/PHBN	
			12 Bulan	6 Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor	
	<b>Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian</b>	<b>100%</b>		<b>21. Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>800.000.000</b>

			83 Orang	1 Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	
			40 Orang	2 Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	3 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	
			2 Dokumen	4 Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten	
			2 Dokumen	5 Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	
			2 Dokumen	6 Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	
			1 Dokumen	7 Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	
			2 Orang	8 Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
			1 Dokumen	9 Fasilitasi Pendataan Ulang PNS Bappeda Provinsi Banten	

7	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	22. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	824.925.000
			12 (dua belas) bulan	1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	
		Rasio Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	100%	23. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	370.000.000
			25 Orang	1 Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda	
			1 Dokumen	2 Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	
			1 Dokumen	3 Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan khusus Bappeda	
					<u>950.000.000</u>
		Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Banten	1 Paket	24. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	950.000.000

			1 dokumen	1	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	
			1 dokumen	2	Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	
			1 dokumen	3	Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	
			1 dokumen	4	Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	
			1 dokumen	5	Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2016	
			1 dokumen	6	Optimalisasi Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2016	
			1 dokumen	7	Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	
<b>Jumlah Anggaran Tahun 2015</b>						<b>36.995.960.000</b>



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2015**

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”.

### 3.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah ditetapkan 1 (satu) sasaran, 7 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (Outcome).

Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	100%	100%	100%	100%
4	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100%	100%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	100%	100%
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepeg	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	10 dok	2 dok	2 dok	100%

1. Sasaran strategis (program) Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan dengan pagu sebesar Rp. 3.039.330.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.948.977.100,00 (97,03%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.
- 2.

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja Program		Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan						
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi APBD Perubahan SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	Verifikasi APBD Perubahan SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi	Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Banten Tahun 2015	Banten Tahun 2015				
		Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030	Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Studi Penyusunan Prioritas Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Banten	Studi Penyusunan Prioritas Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Banten	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten	Identifikasi Potensi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	8 dok	8 dok	8 dok	100,00

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rapat Koordinasi Evaluasi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	Rapat Koordinasi Evaluasi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Berdasarkan WKP I, II dan III	3 dok	3 dok	3 dok	100,00
		Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 dengan Pemerintah Pusat	Konsinyering Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 dengan Pemerintah Pusat	4 dok	4 dok	4 dok	100,00
			Penyusunan Rapergub Standar Operasional Prosedur (SOP) BKPRD Provinsi Banten		1 Rapergub	1 Rapergub	100,00
			Bimbingan Teknis Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Banten		1 dok	1 dok	100,00
			Rapat Koordinasi Penyusunan Review RPJMD Tahun 2010-2017 Mitra Subid Tata Ruang dan LH		1 dok	1 dok	100,00

3. Sasaran strategis (program) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 14.297.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 13.543.625.112,00 (94,73%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100% Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 9 (sembilan) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.3**

**Analisis Pencapaian Sasaran Kedua**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Realisasi	%		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.5**

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan pembangunan;						

	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah						
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016	4 dok	4 dok	4 dok	100,00
		Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	3 dok	3 dok	3 dok	100,00
		Kajian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Banten	Kajian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Banten	3 dok	0 dok		0,00
		Kajian Riview Target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	Kajian Riview Target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Rakor Isu Isu Strategis Provinsi Banten Tahun 2017		1 dok	1 dok	100,00
			Rapergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2016		1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD TA.2016	Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD TA.2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (	Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		UKPPD ) Tahun 2016	( UKPPD ) Tahun 2016				
		Fasilitasi Musrenbangnas	Fasilitasi Musrenbangnas	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2016	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Ta. 2016	2 dok	2 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2015	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Apbd (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2015	2 dok	2 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016	Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2016	Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Sosialisasi Pergub Bankeu Ke Kabupaten/Kota TA. 2016		1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Aplikasi Daftar Rincian Program Dan Kegiatan		1 dok	1 dok	100,00
			Persiapan RAPBD TA. 2016		2 dok	2 dok	100,00
			Persiapan Pelaksanaan Pergub TA. 2016		2 dok	2 dok	100,00
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis	Evaluasi Renja Mitra Subid 2014	Evaluasi Renja Mitra Subid 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016	Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016	Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Renja	Verifikasi Renja	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Perubahan Mitra 2015	Perubahan Mitra 2015				
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi kreatif Provinsi Banten	Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi kreatif Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan (PAD) Provinsi Banten	Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan (PAD) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD 2012-2017 Mitra Bidang Perekonomian Tahun 2016		1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Tahun 2016	2016				
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subsid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis	Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		FGD Bidang Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		FGD Bidang Permodalan di Kawasan Minapolitan	FGD Bidang Permodalan di Kawasan Minapolitan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten	Evaluasi Capaian Kinerja UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah	Evaluasi Capaian Kinerja Mitra Infrastruktur Wilayah	5 dok	5 dok	5 dok	100,00
		Monitoring (Monev) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Monitoring (Monev) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2016	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Program Sektor Air	Koordinasi Perencanaan Program Sektor Air Minum Dan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Minum Dan Sanitasi	Sanitasi				
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air	Analisis Kinerja Bidang Sumber Daya Air	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Analisis Kinerja Bidang Perumahan Permukiman	Analisis Kinerja Bidang Perumahan Permukiman	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-An	Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-An	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Data Base Sanitasi	Penyusunan Data Base Sanitasi	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	Penyusunan Laporan Kegiatan Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD Mitra Bidang Penataan Ruang		1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2014	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2014	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban Tahun 2016	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub	6 dok	6 dok	6 dok	100,00

		Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban				
		Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Ketertiban	6 dok	6 dok	6 dok	100,00
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2016	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Bidang Tahun 2016 Mitra Sub Bidang	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Bidang Tahun 2016 Mitra Sub Bidang	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Koordinasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Hak Azasi Manusia (RANHAM)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	100,00
		Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2015 - 2017 Mitra Subid Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok	1 dok	100,00

	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Drpk SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Drpk SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan PUG	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan PUG	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012-2017 Mitra Subid Kesejahteraan Sosial		1 dok	1 dok	100,00

			Dan Gender				
	Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan	Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan	Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015	Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan rancangan indikator output dan outcome kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja	Identifikasi Isu Strategis Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten	Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Seminar Budaya Kerja Banten	Seminar Budaya Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012 - 2017 Mitra Subid SDM, Budaya dan Keagamaan		1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	3 dok	3 dok	3 dok	100,00
		Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016	Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016	7 dok	7 dok	7 dok	100,00
		Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015	Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015	7 dok	7 dok	7 dok	100,00
		Koordinasi Integrasi, Sinergitas, Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah	Koordinasi Integrasi, Sinergitas, Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD	Koordinasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2015	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

			Kabupaten/Kota				
		Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Review RPJMD Tahun 2012-2017 Mitra Subid Tata Pemerintahan		1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Laporan Ketahanan Daerah		1 dok	1 dok	100,00
			Penyusunan Lampiran RAD (Rencana Aksi Daerah) Pengentasan Daerah Tertinggal Tahun 2016		1 dok	1 dok	100,00

4. Sasaran strategis (program) Pengendalian Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.404.930.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 3.956.974.339,00 (91,78%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 99,68% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan sehingga capaian dimaksud terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.4**

**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	99,68	99,68%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 91,56%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian Pembangunan Daerah						
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014	Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014	8 dok	8 dok	8 dok	100,00
		Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Pprovinsi Banten TA. 2015	Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Pprovinsi Banten TA. 2015	4 dok	4 dok	4 dok	100,00
		Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015	2 dok	2 dok	2 dok	100,00

		Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Provinsi Banten	Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Provinsi Banten	1 paket	1 paket	1 Paket	100,00
			Penyusunan PERKIN dan IKU Perubahan Provinsi Banten Tahun 2015		1 dok	1 dok	100,00
			Sistem Pemetaan Monitoring dan Evaluasi		1 Software Pemetaan dan Evaluasi	1 Software	100,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2015	8 Dok (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon dan TP, 4 Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota	8 Dok (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon dan TP, 4 Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota	90 Buku	100,00
		Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2015	4 Dok (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan DAK	4 Dok (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan DAK	40 buku	100,00
		Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2015	Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2015	2 dok (22 buku)	2 dok (22 buku)	22 buku	100,00
		Fasilitasi Rakor Pusat Dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016	Fasilitasi Rakor Pusat Dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016	1 dok (20 buku)	1 dok (20 buku)	20 buku	100,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	12 dok	12 dok	12 dok	100,00
		Penyusunan Peraturan Gubernur tentang strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Banten Tahun 2015	Banten Tahun 2015				
		Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016	Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	80,00
		Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro-Poor Planning budgeting and Monitoring (P3BM)	Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro-Poor Planning budgeting and Monitoring (P3BM)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	5 dok	5 dok	5 dok	100,00
	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengendalian Dan Pengembangan KPI Tangerang	Pengendalian Dan Pengembangan KPI Tangerang	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

4. Sasaran strategis (program) Kerjasama Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- realisasi keuangan sebesar Rp. 996.446.179,00 (94,90%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.5**

**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.9**

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR  
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kerjasama Pembangunan Daerah						
	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015	Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015	Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015	Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat	Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat	3 dok	3 dok	3 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG	Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG	3 dok	3 dok	3 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON	Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
			RAKORTAS Banten - Lampung Tahun 2015		1 dok	1 dok	100,00

5. Sasaran strategis (program) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.842.800.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.904.399.900,00 (97,26%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 99,38% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan pada kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ada 1 (satu) tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan	Prosen	100	100	100%	100	98,84	94,84%
2	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,69%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

TABEL 3.11

RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR  
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,						

	perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;						
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2014	Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015TA. 2014	Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015TA. 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten	Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen LRA , Laporan Oprasional (LO) Laporan perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi berbasis Akrual Kegiatan SKPD	Dokumen LRA , Laporan Oprasional (LO) Laporan perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi berbasis Akrual Kegiatan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Banten TA.2015	Banten TA.2015				
		Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015 Semester I dan Semester II	Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015 Semester I dan Semester II	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015	Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015	Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2015	1 dok	1 dok		0,00
		Dokumen Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Prov. Banten TA. 2015	Dokumen Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Prov. Banten TA. 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2015	Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2015	1 dok	1 dok	1 dok	15,00
		Dokumen Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015	Dokumen Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015	Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan DRPK Tahun 2016	Penyusunan DRPK Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016	Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPAP Tahun 2015	Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPAP Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	12 dok	12 dok	12 dok	100,00
		Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	12 dok	12 dok	12 dok	100,00
		Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015	12 dok	12 dok	12 dok	100,00
		Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian	Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Anugerah Pangripta Banten	Anugerah Pangripta Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pembuatan Maket dan Site Plant Gedung Bappeda Provinsi Banten	Pembuatan Maket dan Site Plant Gedung Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDRA)	Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDRA)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten	Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

6. Sasaran strategis (program) Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 11.411.900.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 10.415.607.635,00 (91,27%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 99,62% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 6 (enam) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan :

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tolok ukur yang tidak dilaksanakan Pengadaan Piring Ceper dan Gelas
- Peningkatan Kapasitas Aparatur tolok ukur yang tidak dilaksanakan Fasilitas Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

**Tabel 3.7**

**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
2	Rasio Penyelenggaraan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah							
3	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	Prosen	100	100	100%	100	99,71	99,71%
4	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	Prosen	100	100	100%	100	97,41	99,41%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,69%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.12**

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR  
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur						
	Pengadaan Sarana Prasarana	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	1 unit	1 unit	100,00

	Kantor	Empat ( 1 unit)	Roda Empat ( 1 unit)				
		Pengadaan Mesin Tik Elektrikal (10 unit)	Pengadaan Mesin Tik Elektrikal (10 unit)	10 Unit	10 Unit	10 unit	100,00
		Pengadaan Filling Kabinet (5 unit)	Pengadaan Filling Kabinet (5 unit)	5 Unit	5 Unit	5 unit	100,00
		Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (10 unit)	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (10 unit)	10 Unit	10 Unit	10 unit	100,00
		Pengadaan Sofa Perpustakaan	Pengadaan Sofa Perpustakaan	1 Unit	1 Unit	1 unit	100,00
		Pengadaan Penggantian Gordyn	Pengadaan Penggantian Gordyn	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan	Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Pengadaan AC Split 1 PK (10 unit)	Pengadaan AC Split 1 PK (10 unit)	10 unit	10 unit	10 Unit	100,00
		Pengadaan Piring Ceper dan Gelas	Pengadaan Piring Ceper dan Gelas	1 Paket	1 Paket		0,00
		Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Pengadaan Loudspeaker Ruangan	Pengadaan Loudspeaker Ruangan	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program	Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (8 unit)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (8 unit)	8 unit	8 unit	8 Unit	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Note Book (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Note Book (10 unit)	10 unit	10 unit	10 unit	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Printer (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Printer (10 unit)	10 unit	10 unit	10 unit	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Lemari Perpustakaan dan PPAP	Belanja Modal Pengadaan Lemari Perpustakaan dan PPAP	1 Paket	1 Paket	1 paket	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip (10 unit)	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip (10 unit)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Roll O'pack (2 unit)	Belanja Modal Pengadaan Roll	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00

			O'pack (2 unit)				
		Belanja Modal Pengadaan Penggantian Audio Amplifier Ruang Rapat Paripurna	Belanja Modal Pengadaan Penggantian Audio Amplifier Ruang Rapat Paripurna	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
		Belanja Modal Pengadaan Slide Projector (6 unit)	Belanja Modal Pengadaan Slide Projector (6 unit)	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100,00
		Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda	Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
		Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua	Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
		Pemasangan Relling Kantin	Pemasangan Relling Kantin	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
		Pengadaan Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda	Pengadaan Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
		Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah	Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah	1 paket	1 paket	1 paket	100,00
			Belanja Modal Pengadaan PC Komputer		1 Unit	1 Unit	100,00
			Belanja UPS		1 Unit	1 Unit	100,00
			Pengadaan Printer Ploter		1 Unit	1 Unit	100,00
			Pengadaan Brangkas		1 Unit	1 Unit	100,00
			Pengadaan Ruang Bidang Bappeda		1 paket	1 paket	100,00
			Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Software Pemetaan		1 paket	1 paket	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100,00
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 30 unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan	12 Bulan, 30 unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset	12 bulan	100,00

				1 Unit Genset			
		Pemeliharaan Inventaris Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	100,00
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penunjang Penguatan Kelembagaan	Penunjang Penguatan Kelembagaan	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Penyediaan Barang Habis Pakai	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan	12 bulan	12 bln	100,00
		Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 bulan	12 bulan	12 bln	100,00
		Penyediaan Bahan Cetak	Penyediaan Bahan Cetak	12 bulan	12 bulan	12 bln	100,00
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bln	100,00
		Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bln	100,00
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	83 Orang	83 Orang	83 Orang	100,00
		Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100,00
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten	2 dok	2 dok	2 dok	100,00
		Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten	1 dok	1 dok	1 dok	100,00

		Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	6 Orang	2 Orang		0,00
			fasilitasi pendataan ulang PNS Bappeda Provinsi Banten		1 dok	1 dok	100,00
	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda	Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda	1 Keg 25 Orang	1 Keg 25 Orang	25 Org	100,00
		Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 Keg 15 Orang	1 Keg 15 Orang	15 org	100,00
		Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Khusus Bappeda	Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Khusus Bappeda	1 dok	1 dok	1 dok	95,00

7. Sasaran strategis (program) Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 950.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 873.540.200,00 (91,95%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.8**

**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2015 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.14**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur		Target		Realisasi	%
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Statistik;						
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah						
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	100,00
		Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah	1 video Pembangunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah	1 video Pembangunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet,	1 video Pembangunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah	100,00

				(Booklet, Leaflet dan banner)	Leaflet dan banner)	(Booklet, Leaflet dan banner)	

### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.714.273.036,- atau sebesar 94,82 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 31.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 29.444.449.860,- atau sebesar 94,98 % dan realisasi fisik mencapai 99,23%, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 pagu kegiatan Rp. 39.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 37.158.722.896,- atau sebesar 94,95% dan realisasi fisik mencapai 99,39%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN  
BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015**

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
I.	<b>Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>	2.939.330.000,00	3.039.330.000,00	<b>100,00</b>	2.948.977.100,00	97,03
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.939.330.000,00	3.039.330.000,00	100,00	2.948.977.100,00	97,03
II.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	12.947.000.000,00	14.297.000.000,00	<b>100,00</b>	13.543.625.112,00	94,73
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.900.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	2.940.361.500,00	93,34
2.	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.300.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	1.539.627.600,00	93,31

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
3.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	2.472.000.000,00	2.572.000.000,00	100,00	1.175.253.180,00	95,94
4.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00	2.454.689.250,00	95,44
5.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00	1.549.407.000,00	99,96
6.	Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	950.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	1.080.053.804,00	93,92
7.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	950.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	980.500.000,00	93,38
8.	Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.143.804.000,00	95,32
9.	Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	650.000.000,00	750.000.000,00	100,00	679.928.778,00	90,66
III .	Pengendalian Pembangunan Daerah	4.329.930.000,00	4.404.930.000,00	99,68	3.956.974.339,00	91,78
1.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	2.219.930.000,00	2.294.930.000,00	100,00	2.106.205.710,00	91,78
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	615.055.000,00	82,01
3.	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	960.000.000,00	960.000.000,00	98,54	859.266.000,00	89,51
4.	Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	376.447.629,00	94,11

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		%
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3		4	5	6
IV.	Kerjasama Pembangunan Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	996.445.179,00	94,90
1.	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	996.445.179,00	94,90
V.	<b>Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	1.807.800.000,00	1.842.800.000,00	99,38	1.904.399.900,00	97,26
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	757.800.000,00	757.800.000,00	98,84	528.434.500,00	69,73
2.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.050.000.000,00	1.085.000.000,00	100,00	1.070.515.500,00	98,67
VI.	<b>Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>	10.967.453.000,00	11.411.900.000,00	99,69	10.415.607.635,00	91,27
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.275.800.000,00	2.725.800.000,00	99,71	2.564.059.900,00	94,07
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.687.728.000,00	2.582.175.000,00	100,00	2.278.676.250,00	88,25
3.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.014.000.000,00	4.109.000.000,00	100,00	3.873.461.115,00	94,27
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	795.000.000,00	800.000.000,00	97,41	730.619.370,00	91,33
5.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	824.925.000,00	824.925.000,00	100,00	640.010.000,00	77,58
6.	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	328.781.000,00	88,86
VII.	<b>Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	873.540.200,00	91,95
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	873.540.200,00	91,95
	<b>JUMLAH</b>	34.991.513.000,00	36.995.960.000,00	99,23	34.334.119.565,00	92,81
	Belanja Tidak Langsung	8.502.000.000,00	7.583.000.000,00	100,00	7.171.701.748,00	94,58
	<b>TOTAL</b>	43.493.513.000,00	44.578.960.000,00	99,86	41.505.821.313,00	93,11

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good govermance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pelaksanaan amanat

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.

6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Pengaturan asset (kendaraan dinas) belum tertib;